

THE STRUCTURAL PRODUCTION OF ETHICAL DILEMMAS IN COMMUNITY-BASED STUNTING POLICY: SOCIAL WORK AND THE LOCAL IMPLEMENTATION OF STUNTING POLICY IN INDONESIA

DOI: <https://doi.org/10.31595/biyan.v8i1.1720>

Fadila Maulida

Politeknik Kesejahteraan Sosial
Bandung, Indonesia
Fadilamaulidao@gmail.com

Journal History

Received: 22 December 2025

Accepted: 26 June 2026

Published: 26 June 2026

ABSTRACT

The village-level implementation of Indonesia's BKKBN stunting reduction program involves challenges that extend beyond technical delivery to encompass structural constraints and ethical tensions. This study examines program implementation in Marampiau Hilir Village, Tapin Regency, focusing on how social workers and frontline implementers navigate competing obligations within a family-based social policy framework. Using a qualitative case study design, data were generated through participatory observation, structured discussions with program actors, and the researcher's direct engagement in community-based stunting interventions. The findings identify five interrelated barriers: limited community understanding of stunting, inadequate human-resource capacity, fragmented intersectoral coordination, inaccurate beneficiary targeting, and centralized performance pressures. Together, these conditions place frontline implementers in ethical gray zones where professional values, community empowerment, administrative compliance, and performance targets cannot always be reconciled. The study's principal contribution lies in demonstrating that ethical dilemmas are not merely individual problems of professional judgment but are structurally produced through the interaction between centralized policy design, local institutional capacity, and community realities. By positioning frontline ethics as a critical dimension of implementation effectiveness, this study extends social work and social policy scholarship on stunting prevention. It argues that effective intervention requires not only improved technical coordination and targeting accuracy but also adaptive governance mechanisms that provide frontline workers with contextual discretion, ethical support, and meaningful community participation.

KEYWORDS:

Stunting, BKKBN Program, Ethical Dilemmas, Social Work, Policy Implementation, village-level stunting interventions

ABSTRAK

Implementasi Program Stunting BKKBN di tingkat desa menghadapi berbagai tantangan yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga etis dan struktural. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis dinamika implementasi Program Stunting BKKBN di Desa Marampiau Hilir, Kabupaten Tapin, dengan menyoroti dilema etik yang dihadapi oleh pekerja sosial dan aktor pelaksana program dalam konteks kebijakan sosial berbasis keluarga. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus melalui observasi partisipatif, diskusi dengan pelaksana program, serta keterlibatan langsung peneliti dalam kegiatan KKN Stunting. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya pemahaman masyarakat mengenai stunting, keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya koordinasi lintas sektor, ketidaktepatan bantuan, serta tekanan pencapaian target dari pemerintah pusat menjadi faktor utama yang memengaruhi efektivitas implementasi program. Kondisi tersebut menempatkan pekerja sosial pada situasi zona abu-abu, khususnya dalam menyeimbangkan nilai profesional pekerjaan sosial dengan tuntutan administratif dan kebijakan. Studi ini menegaskan bahwa keberhasilan program stunting memerlukan pendekatan berbasis komunitas yang lebih kontekstual, fleksibilitas kebijakan di tingkat implementasi, serta penguatan peran pekerja sosial dalam menjembatani kepentingan kebijakan dan

kebutuhan masyarakat.

Kata Kunci:

Stunting, Program BKKBN, Dilema Etik, Pekerjaan Sosial, Implementasi Kebijakan Sosial, Tingkat Desa

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Stunting merupakan salah satu permasalahan pembangunan manusia yang hingga kini masih menjadi fokus utama kebijakan Kesehatan dan kesejahteraan sosial. Kondisi stunting tidak hanya berdampak pada pertumbuhan fisik anak, tetapi juga berpengaruh terhadap perkembangan kognitif, produktivitas serta kualitas sumber daya manusia dalam jangka Panjang (Black dkk., 2013). Oleh karena itu, penanganan stunting dipandang sebagai isu multidimensi yang memerlukan intervensi lintas sektor, lintas profesi, dan berbasis komunitas (Ruel dkk., 2018)

Sebagai respons terhadap permasalahan tersebut, pemerintah Indonesia melalui Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menginisiasi program percepatan penurunan stunting dengan pendekatan berbasis keluarga. Program ini menempatkan keluarga sebagai aktor utama dalam pencegahan stunting melalui edukasi gizi, perencanaan keluarga, peningkatan pola asuh serta pendampingan keluarga berisiko stunting (*PEDOMAN PELAKSANAAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING*, 2021). Dalam implementasinya, program ini dijalankan hingga tingkat desa dengan melibatkan berbagai aktor lapangan, seperti Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB), pekerja sosial, bidan desa, kader kesehatan dan unsur masyarakat lainnya (*Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Stunting 2018-2024*, 2020)

Di tingkat desa, implementasi program stunting BKKBN menghadapi dinamika sosial yang kompleks. Masyarakat desa memiliki latar belakang sosial, budaya, dan ekonomi yang beragam, yang memengaruhi cara mereka memahami dan merespons program pemerintah. Rendahnya literasi gizi, kuatnya kebiasaan turun temurun, pernikahan dini, serta keterbatasan akses informasi menjadi tantangan tersendiri dalam proses edukasi masyarakat (*Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Stunting 2018-2024*, 2020). Dalam kondisi tersebut aktor lapangan tidak hanya berperan sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai fasilitator perubahan perilaku dan mediator antara kebijakan negara dan realitas kehidupan masyarakat (Black dkk., 2013).

Namun, dalam praktiknya, pelaksana program di tingkat desa juga dihadapkan pada tuntutan pencapaian target yang ditetapkan secara nasional. Target tersebut mencakup capaian pendataan, jumlah keluarga sasaran yang didampingi, serta indikator administratif lainnya yang harus dilaporkan secara berkala (*PEDOMAN PELAKSANAAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING*, 2021). Tekanan pencapaian target ini seringkali berbenturan dengan proses edukasi masyarakat yang membutuhkan waktu, pendekatan persuasif, dan relasi sosial yang berkelanjutan. Akibatnya, muncul ketegangan antara orientasi pada hasil (output) dan proses pendampingan yang berlandaskan nilai-nilai profesional pekerjaan sosial (Banks, 2012).

Bagi pekerja sosial dan aktor pendamping lainnya, situasi tersebut menimbulkan zona abu-abu etika dalam praktik implementasi program. Di satu sisi, mereka memiliki tanggung jawab institusional untuk mendukung keberhasilan program pemerintah. Di sisi lain, mereka terikat pada nilai dan prinsip profesional pekerjaan sosial, seperti penghormatan terhadap martabat manusia, partisipasi masyarakat, pemberdayaan dan kepekaan terhadap konteks sosial dan budaya (*Social Work Statement of Ethical Principle*, 2018). Ketika tuntutan target program tidak sejalan dengan kesiapan dan pemahaman masyarakat, pelaksana program dihadapkan pada pilihan-pilihan sulit dalam pengambilan keputusan di lapangan (Banks, 2012)

Dalam perspektif pekerja sosial, praktik pendampingan masyarakat tidak dapat dilepaskan dari nilai prinsip etik profesional. *International federation of social workers* (IFSW) menegaskan bahwa pekerja sosial berkewajiban menjunjung tinggi martabat manusia, keadilan sosial, partisipasi dan penghormatan terhadap otonomi individu (*Social Work Statement of Ethical Principle*, 2018). Prinsip-prinsip tersebut menjadi landasan dalam praktik pekerja sosial pada tingkat individu, keluarga maupun komunitas. Namun dalam konteks implementasi kebijakan sosial, pekerja sosial sering dihadapkan pada dilemma etik Ketika tuntutan institusional tidak sepenuhnya sejalan dengan kebutuhan dan kesiapan masyarakat (Healy, 2014). Kondisi inilah yang tercermin dalam implementasi program stunting BKKBN di tingkat desa.

Pengalaman pelaksanaan KKN Stunting di Desa Marampiau Hilir memberikan gambaran nyata mengenai kondisi tersebut. Mahasiswa KKN Bersama PLKB, pekerja sosial, dan bidan desa terlibat langsung dalam proses edukasi dan pendampingan masyarakat terkait pencegahan stunting. Dalam proses tersebut, terlihat adanya kesenjangan antara perencanaan program dan realitas lapangan, serta munculnya praktik-praktik adaptif yang dilakukan oleh aktor lapangan untuk memenuhi tuntutan program tanpa sepenuhnya mengabaikan kondisi sosial masyarakat (Lipsky, 2010).

Selain itu implementasi kebijakan publik menunjukkan bahwa keberhasilan program sosial di tingkat akar rumput sangat dipengaruhi oleh diskresi dan pertimbangan profesional aktor lapangan. (Lipsky, 2010) menyebutkan bahwa aktor pelaksana di tingkat lokal *street-level bureaucrats* yang memiliki ruang interpretasi dalam menerjemahkan kebijakan formal ke dalam konteks sehari-hari. Dalam konteks program stunting,

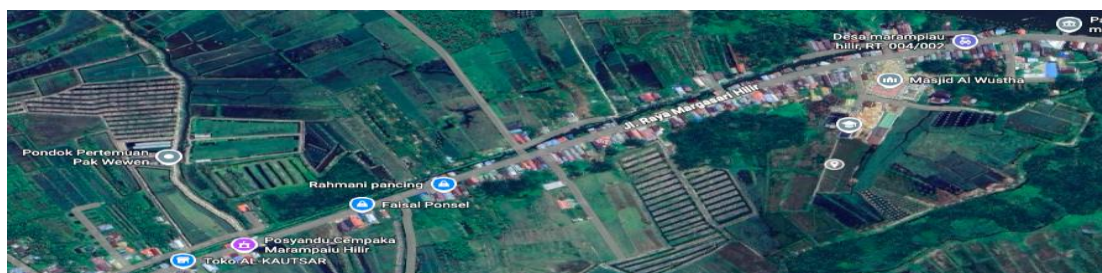
ruang diskresi ini menjadi penting karena pelaksana program harus menyesuaikan intervensi dengan kondisi sosial, budaya, dan psikologis masyarakat sasaran (Elly Susilowati, 2020; Susilowati et al., 2019).

Namun, ruang diskresi tersebut juga berpotensi memunculkan dilema etik, tekanan administratif, dan keterbatasan sumber daya yang tidak sebanding dengan kompleksitas permasalahan yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu, analisis implementasi program stunting tidak hanya perlu menyoroti aspek teknis dan capaian program. Tetapi, juga mempertimbangkan dimensi etik, profesionalisme dan relasi kuasa yang memberntuk praktik pendampingan tingkat desa (Soelton et al., 2021).

Berdasarkan konteks tersebut, artikel ini bertujuan untuk mengkaji implementasi program stunting BKKBN tingkat desa melalui studi kasus kegiatan KKN Stunting di Desa Marampiau Hilir. Fokus kajian diarahkan pada dinamika pelaksanaan program dan implikasi etik yang dihadapi oleh pelaksana program, khususnya pekerja sosial, dalam menyeimbangkan tuntutan kebijakan dengan nilai-nilai profesional dan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi reflektif terhadap praktik implementasi program stunting yang lebih etis, kontekstual dan berorientasi pada pemberdayaan Masyarakat (Subardhini et al., 2021).

Letak Geografis

Untuk memberikan gambaran umum mengenai konteks penelitian, berikut disajikan penjelasan singkat mengenai kondisi geografis dan administratif Desa Marampiau Hilir sebagai lokasi pelaksanaan Program Stunting Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Informasi ini bertujuan untuk membantu pembaca memahami karakteristik wilayah yang menjadinlatar implementasi program, tanpa mengalihkan fokus utama kajian dari analisis praktik dan dinamika kebijakan tingkat desa.



Gambar 1.1 Letak geografis Desa Marampiau Hilir
Sumber : google maps

Desa Marampiau Hilir terletak di Kecamatan Candi Laras, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan. Adapun batas-batas wilayah Desa Marampiau Hilir meliputi :

Sebelah Utara	Desa Rawana
Sebelah Selatan	Desa Pembaungan
Sebelah Barat	Desa Margasari
Sebelah Timur	Desa Marampiau Hulu

Tabel 1.1 Batas wilayah desa
Sumber : Laporan KKN Stunting(Ansari, t.t.)

Kemudian Adapun wilayah geografis Desa Marampiau Hilir akan diterangkan sebagai berikut :

Lahan Sawah	20 Ha
Lahan Ladang	5,5 Ha
Lahan Perkebunan	994 Ha
Lahan Pekarangan	58 Ha
Lahan Pangan	254 Ha
Lain-Lain	4,5
Jumlah Sertifikat Tanah/Luas Tanah	150 buah/347 Ha
Luas Tanah Kas Desa	2 Ha

Tabel 1.2 Wilayah geografis
Sumber : Laporan KKN Stunting(Ansari, t.t.)

Kemudian data dibawah ini akan menerangkan tentang jumlah kepala keluarga di Desa Marampiau Hilir berikut :

Jumlah Kepala Keluarga	227 KK
------------------------	--------

Keluarga Pra-Sejahtera	100 KK
Keluarga Sejahtera I	215 KK
Keluarga Sejahtera II	47 KK
Keluarga Sejahtera III	20 KK
Keluarga Sejahtera III Plus	7 KK

Tabel 1.3 Jumlah kepala keluarga
Sumber : Laporan KKN Stunting (Ansari, t.t.)

Adapun, Jumlah Penduduk Desa Marampiau Hilir :

Jumlah Penduduk	868 jiwa
Laki-laki	444 jiwa
Perempuan	424 jiwa
Usia 18-56 tahun	267 jiwa

Tabel 1.4 Jumlah penduduk desa
Sumber : Laporan KKN Stunting (Ansari, t.t.)

Mata pencaharian masyarakat Desa Marampiau Hilir, adalah sebagai berikut ;

Karyawan	30 orang
PNS	10 orang
Karyawan swasta	4 orang
Wiraswasta	47 orang
Petani	206 orang
Buruh Tani	2 orang
Nelayan	5 orang
Perternak	10 orang
Jasa	8 orang

Tabel 1.5 Mata pencaharian penduduk
Sumber : Laporan KKN Stunting (Ansari, t.t.)

Tingkat Pendidikan masyarakat Desa Marampiau Hilir :

Lulusan Pendidikan Umum	266 orang
Taman Kanak-Kanak	56 orang
Sekolah Dasar/ sederajat	200 orang
Sekolah Menengah Pertama/ sederajat	150 orang
Sekolah Menengah Atas/ Sederajat	95 orang
Akademi/ D1- D3	3 orang
S1	10 orang
S2	-
S3	-

Tabel 1.6 Tingkat Pendidikan
Sumber : Laporan KKN Stunting (Ansari, t.t.)

Berdasarkan data geografis dan kependudukan desa, terlihat bahwa struktur wilayah didominasi oleh lahan perkebunan dan pertanian, sementara lahan pekarangan dan fasilitas umum relative terbatas. Kondisi ini menunjukkan bahwa desa memiliki potensi ekonomi berbasis sektor agraris, namun di sisi lain juga mengindikasikan keterbatasan akses masyarakat terhadap sumber daya pendukung kesejahteraan keluarga, khususnya yang berkaitan dengan ketersediaan pangan bergizi yang beragam dan berkelanjutan di tingkat rumah tangga.

Dari aspek kesejahteraan keluarga, masih ditemukannya keluarga pra-sejahtera dan keluarga sejahtera tingkat I dalam jumlah yang cukup signifikan menunjukkan adanya kerentanan sosial-ekonomi yang berpotensi berdampak langsung terhadap pemenuhan kebutuhan dasar keluarga, termasuk pemenuhan gizi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Kondisi ini menjadi salah satu faktor struktural yang dapat memperkuat resiko terjadinya stunting apabila tidak diimbangi dengan intervensi edukasi gizi, penguatan ekonomi keluarga, dan akses layanan Kesehatan yang memadai

Komposisi penduduk usia produktif yang relatif besar seharusnya menjadi modal sosial dalam mendukung pembangunan desa dan keberlanjutan program pencegahan stunting. Namun, dominasi mata pencaharian sebagai petani dan buruh tani yang cenderung pada musim dan hasil alam menunjukkan adanya ketidakstabilan ekonomi ini berpotensi mempengaruhi pola konsumsi keluarga, termasuk kualitas dan kuantitas asupan gizi anak.

Ditinjau dari tingkat Pendidikan, mayoritas penduduk berada pada jenjang Pendidikan dasar dan menengah, sementara jumlah penduduk dengan Pendidikan tinggi masih sangat terbatas. Kondisi ini berimplikasi pada rendahnya literasi Kesehatan dan gizi, khususnya terkait pemahaman pola asuh, praktik pemberian makan anak, serta pemanfaatan layanan Kesehatan. Rendahnya tingkat Pendidikan juga dapat memengaruhi efektivitas penyampaian informasi Kesehatan, sehingga diperlukan pendekatan edukatif yang kontekstual, partisipatif dan berbasis budaya local (Haecal, 2022).

Secara keseluruhan, data tersebut memperlihatkan bahwa permasalahan stunting di desa tidak dapat dipahami semata-mata sebagai isu Kesehatan, melainkan merupakan persoalan multidimensional yang berkaitan erat dengan kondisi sosial-ekonomi, tingkat Pendidikan, struktur mata pencaharian, serta akses terhadap sumber daya. Oleh karena itu, intervensi stunting melalui program KKN tidak hanya perlu berfokus pada aspek medis dan gizi, tetapi juga harus mengintegrasikan pendekatan pemberdayaan masyarakat, penguatan kapasitas keluarga, dan peningkatan literasi gizi yang berkelanjutan (Susilowati et al., 2023).

Seluruh data yang dianalisis di atas merupakan data faktual yang diperoleh pada saat pelaksanaan studi kasus Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dengan fokus penanganan stunting, sehingga mencerminkan kondisi riil masyarakat pada periode intervensi dan menjadi dasar dalam perumusan strategi program yang kontekstual dan berbasis kebutuhan lokal. Data tersebut dikumpulkan melalui keterlibatan langsung peneliti dalam berbagai aktivitas pendampingan, edukasi dan koordinasi dengan aktor pelaksana program di tingkat desa (Haecal, 2023).

Berdasarkan data faktual tersebut, perumusan strategi program yang kontekstual menjadi lebih relevan dan realitis. Strategi yang dikembangkan tidak hanya berorientasi pada pencapaian target program, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan nyata masyarakat, kapasitas lokal, serta prinsip-prinsip pemberdayaan yang menjadi landasan praktik pekerjaan sosial. Hal ini mengaskan bahwa pendekatan berbasis data lapangan sangat penting untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program penanganan stunting di tingkat desa (Susilawati et al., 2019).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk memahami implementasi program stunting BKKBN di tingkat desa. Pendekatan ini dipilih karena fokus kajian diarahkan pada proses pelaksanaan program, dinamika praktik pendampingan, serta dilema etik yang dihadapi oleh pelaksana program, khususnya pekerja sosial, dalam konteks kebijakan publik berbasis keluarga (Haecal & Rusmana, 2022).

Lokasi penelitian berada di desa Marampiau Hilir yang dipilih secara purposif sebagai lokasi pelaksanaan KKN stunting. Studi kasus pada desa ini memungkinkan peneliti untuk mengkaji secara mendalam kebijakan nasional diterjemahkan dan diadaptasi dalam praktik implementasi di tingkat local (Susilowati, 2021).

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipatif, diskusi dengan pelaksana program, serta keterlibatan langsung peneliti dalam KKN stunting. Observasi partisipatif dilakukan untuk mengamati proses pelaksanaan program dan interaksi antara PLKB, pekerja sosial, bidan desa, dan masyarakat. Diskusi dilakukan untuk menggali pengalaman, persepsi serta tantangan yang dihadapi pelaksana program dalam menjalankan kegiatan edukasi dan pendampingan masyarakat.

Data dianalisis secara kualitatif melalui proses pengelompokan dan penafsiran tematik untuk mengidentifikasi pola implementasi program, dinamika lapangan, serta implikasi etik yang muncul dalam pendampingan di tingkat desa. Untuk menjaga keabsahan data, dilakukan triangulasi sumber dengan membandingkan hasil observasi diskusi dari berbagai aktor pelaksana program.

Sebagai integral dari proses penelitian, peneliti terlibat langsung dalam berbagai kegiatan KKN Stunting yang dilaksanakan di Desa Marampiau Hilir. Keterlibatan ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana pengumpulan data tetapi juga strategi untuk memahami konteks sosial secara lebih mendalam melalui pengalaman empiris lapangan. Posisi peneliti sebagai bagian dari pelaksana kegiatan memungkinkan terbangunnya relasi yang lebih dekat dengan masyarakat dan aktor program, sehingga proses observasi dapat dilakukan secara natural dan reflektif.

Program-program KKN Stunting yang dilaksanakan meliputi kegiatan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT), sosialisasi penggunaan alat kontrasepsi pasca melahirkan/keguguran dan keluarga berencana, penyaluran Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi anak yang terindikasi beresiko stunting, serta program “SHANAK” (Sabiji Hintalu Hagan Anak) atau dalam Bahasa Indonesia satu telur untuk satu anak sebagai bentuk intervensi pemenuhan gizi sederhana berbasis keluarga. Program-program tersebut juga dibantu para

apparat desa dan aktor lapangan program stunting. Melalui pelaksanaan program-program tersebut, peneliti dapat mengamati secara langsung respon masyarakat, tingkat partisipasi serta tantangan yang dihadapi pelaksana program dalam menerjemahkan kebijakan ke dalam praktik nyata di tingkat desa.

Melalui intervensi berbasis keluarga, kegiatan KKN Stunting juga mencakup pendekatan edukatif yang menasar anak-anak dan kelompok masyarakat lainnya. Kegiatan seperti nonton film edukasi tentang makanan bergizi, edukasi konsep “isi piringku”, serta keterlibatan senam ibu hamil dan posyandu balita dan lansia memberikan gambaran mengenai pola komunikasi Kesehatan, pemahaman gizi masyarakat, serta dinamika relasi antar petugas dan warga. Aktivitas ini menjadi ruang penting mengidentifikasi faktor sosial dan budaya yang memengaruhi edukasi stunting di tingkat desa.

Keterlibatan peneliti dalam berbagai kegiatan tersebut memungkinkan proses pengumpulan data berlangsung secara berkelanjutan dan kontekstual. Data yang diperoleh tidak hanya berasal dari interaksi formal dalam kegiatan diskusi, tetapi juga dari pengamatan terhadap praktik sehari-hari, respon spontan masyarakat, serta dinamika kerja antar aktor pelaksana program. Hal ini memperkaya analisis tematik yang dilakukan, khususnya dalam mengidentifikasi dilemma etik yang muncul dalam praktik pendampingan dan implementasi kebijakan.

Dengan demikian pendekatan metodologis yang digunakan dalam penelitian ini memungkinkan pemahaman yang komprehensif terhadap implementasi Program Stunting BKKBN di tingkat desa. Integrasi antara observasi partisipatif, diskusi, dan keterlibatan langsung program KKN Stunting memberikan dasar yang kuat untuk menganalisis dinamika kebijakan, praktik pekerjaan sosial, serta tantangan etik yang dihadapi oleh pelaksana program dalam konteks lokal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Temuan Utama Implementasi Program Stunting di Tingkat Desa

Berdasarkan hasil observasi lapangan serta keterlibatan aktif peneliti selama pelaksanaan program KKN Stunting di tingkat desa, dapat diidentifikasi sejumlah temuan penting yang menggambarkan kompleksitas implementasi program pencegahan stunting di masyarakat. Secara umum, proses edukasi yang ditujukan kepada masyarakat desa belum berjalan secara optimal akibat adanya hambatan yang bersifat struktural maupun kultural. Salah satu kendala utama terletak pada rendahnya tingkat pemahaman masyarakat mengenai stunting sebagai permasalahan gizi kronis yang berdampak jangka panjang terhadap tumbuh kembang anak. Stunting masih kerap dipersepsikan sebagai kondisi tubuh pendek semata atau dianggap sebagai faktor keturunan, sehingga tidak dipahami sebagai indikator kegagalan pemenuhan gizi dan kesehatan sejak periode awal kehidupan.

Keterbatasan pemahaman tersebut menyebabkan materi edukasi yang disampaikan oleh pelaksana program belum mampu mendorong perubahan perilaku secara signifikan di tingkat keluarga. Informasi yang diberikan sering kali hanya diterima sebagai pengetahuan sesaat, tanpa diinternalisasi dalam praktik pengasuhan, pola makan, maupun perilaku kesehatan sehari-hari. Kondisi ini diperparah oleh minimnya intensitas edukasi yang bersifat berkelanjutan dan partisipatif. Edukasi cenderung dilakukan secara sporadis dan bersifat satu arah, sehingga kurang memberikan ruang bagi masyarakat untuk berdialog, bertanya, dan merefleksikan praktik yang telah mereka jalani selama ini.

Selain faktor tersebut, nilai-nilai budaya dan kebiasaan lokal yang telah mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat desa turut memengaruhi efektivitas program. Pola pengasuhan tradisional, kebiasaan pemberian makanan kepada anak, serta persepsi mengenai kesehatan ibu dan anak sering kali bertentangan dengan prinsip-prinsip intervensi gizi yang dianjurkan. Tanpa pendekatan kultural yang sensitif dan adaptif, pesan-pesan kesehatan yang disampaikan menjadi sulit diterima dan diimplementasikan secara konsisten oleh keluarga sasaran.

Temuan penting lainnya berkaitan dengan keterbatasan sumber daya manusia pada tingkat pelaksana program. Aktor-aktor kunci seperti Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB), pekerja sosial, dan bidan desa menghadapi beban kerja yang tinggi dengan jumlah personel yang relatif terbatas. Kondisi ini tidak sebanding dengan luas wilayah kerja serta jumlah keluarga sasaran yang memerlukan pendampingan intensif. Akibatnya, pelaksanaan program cenderung lebih berorientasi pada pemenuhan aspek administratif dibandingkan dengan proses pendampingan substantif yang mendalam dan berkelanjutan (Susilowati et al., n.d.).

Tekanan untuk memenuhi target pendataan dan pelaporan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat turut memengaruhi kualitas implementasi program di tingkat desa. Pelaksana program sering kali dihadapkan pada tuntutan waktu dan indikator kinerja yang ketat, sehingga fokus pendampingan bergeser dari upaya perubahan perilaku jangka panjang menuju pemenuhan kewajiban administratif. Dalam konteks ini, interaksi antara pelaksana program dan keluarga sasaran menjadi terbatas, sehingga proses edukasi, monitoring, dan evaluasi tidak dapat dilakukan secara optimal.

Selain itu, studi ini juga menemukan adanya ketidaktepatan sasaran dalam pemanfaatan bantuan program, khususnya bantuan makanan tambahan yang diperuntukkan bagi anak yang teridentifikasi

mengalami stunting. Dalam beberapa kasus, bantuan tersebut justru dikonsumsi oleh anggota keluarga lain, terutama orang tua, dengan alasan keterbatasan ekonomi rumah tangga. Fenomena ini mencerminkan rendahnya pemahaman keluarga mengenai tujuan intervensi gizi serta pentingnya pemenuhan kebutuhan nutrisi spesifik bagi anak dalam periode pertumbuhan kritis. Di sisi lain, kondisi ini juga menunjukkan lemahnya mekanisme pendampingan, pengawasan, dan edukasi lanjutan di tingkat keluarga.

Permasalahan pendataan turut menjadi temuan krusial dalam implementasi program stunting di tingkat desa. Data keluarga berisiko stunting belum sepenuhnya akurat dan tidak selalu diperbarui secara berkala, sehingga berimplikasi pada ketidaktepatan sasaran intervensi. Ketidaksinkronan data antara berbagai pihak terkait, seperti perangkat desa, tenaga kesehatan, dan pelaksana program sosial, memperparah kondisi tersebut. Kurangnya koordinasi lintas sektor menyebabkan informasi yang digunakan sebagai dasar perencanaan dan pelaksanaan program menjadi tidak valid dan sulit dipertanggungjawabkan.

Secara keseluruhan, temuan-temuan ini menunjukkan bahwa implementasi program pencegahan stunting di tingkat desa tidak hanya menghadapi persoalan teknis, tetapi juga persoalan struktural, kultural, dan kelembagaan. Keberhasilan program sangat bergantung pada penguatan kapasitas pelaksana, peningkatan kualitas edukasi yang kontekstual dan berkelanjutan, perbaikan sistem pendataan, serta penguatan koordinasi lintas sektor. Tanpa upaya komprehensif yang menyentuh aspek-aspek tersebut, program stunting berpotensi berjalan secara prosedural namun belum mampu memberikan dampak nyata terhadap penurunan angka stunting di tingkat masyarakat.

Dilema Etik Dalam Prespektif Nilai dan Etika Pekerjaan Sosial

Temuan-temuan tersebut memperlihatkan adanya dilema etik yang dihadapi oleh pekerja sosial dan aktor pelaksana program di lapangan. Dalam prespektif nilai pekerjaan sosial, pekerja sosial dituntut untuk menjunjung tinggi prinsip penghormatan terhadap martabat manusia, partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. Namun, realitas lapangan menunjukkan bahwa keterbatasan waktu, sumber daya dan tekanan target program sering kali membatasi ruang bagi pendekatan benar-benar partisipatif dan berorientasi pada proses.

Kemudian dilema etik yang dihadapi oleh pekerja sosial yang berhadapan langsung dengan tuntutan kebijakan dan realitas sosial masyarakat. Nilai pekerjaan sosial seperti penghormatan terhadap martabat manusia (*self-determination*) kerap berada dalam posisi yang tidak sepenuhnya sejalan dengan mekanisme implementasi program yang bersifat *target-oriented*.

Dalam praktiknya, pekerja sosial dan PLKB dihadapkan pada kondisi masyarakat yang memiliki keterbatasan pemahaman mengenai stunting. Dipengaruhi oleh faktor budaya serta keadaan ekonomi keluarga yang rentan. Dilema muncul ketika intervensi dirancang untuk kepentingan terbaik anak seperti pemberian makanan tambahan tidak sepenuhnya digunakan sesuai dengan tujuan program. Situasi ini menempatkan pekerja sosial pada posisi dilema etis antara prinsip *non-judgemental* dan empati terhadap kondisi keluarga, dengan kewajiban profesional untuk memastikan perlindungan dan pemenuhan hak anak.

Kasus pemanfaatan bantuan yang tidak sesuai sasaran, menempatkan pekerja sosial pada posisi dilematis. Di satu sisi, pekerja sosial memiliki kewajiban untuk memastikan kepentingan terbaik anak terpenuhi. Di sisi lain, intervensi yang terlalu kontrolatif terhadap keluarga berpotensi melanggar prinsip penghormatan terhadap otonomi keluarga. Situasi ini mencerminkan zona abu-abu etika, dimana tidak tersedia pilihan yang sepenuhnya ideal secara etik.

Selain itu, tekanan administratif dan pelaporan dari tingkat pusat turut memengaruhi pengambilan keputusan etik di lapangan. Pekerja sosial seringkali harus memilih antara melaporkan capaian program secara normatif sesuai indikator, atau menyampaikan kondisi faktual yang menunjukkan keterbatasan efektivitas intervensi. Kondisi ini memperlihatkan bahwa dilema etik dalam konteks program stunting tidak hanya bersifat individual, tetapi juga struktural, yang menuntut refleksi etis berkelanjutan dalam praktik pekerjaan sosial.

Analisis Dalam Kerangka *Community Organization* dan *Community Development* (CO/CD)

Dari perspektif *community organization* dan *community development*, implementasi program stunting di desa Marangpau Hilir menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan masih cenderung *top-down*. Program lebih banyak berorientasi pada pencapaian target yang ditetapkan dari atas, sementara keterlibatan aktif masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program masih terbatas. Minimnya partisipasi masyarakat berkontribusi pada rendahnya rasa kepemilikan (*sense of ownership*) terhadap program, yang berdampak pada lemahnya keberlanjutan intervensi.

Dalam konteks CO/CD, kondisi ini menjadi tantangan etik tersendiri bagi pekerja sosial. Pekerja sosial berada di posisi yang harus menjembatani kepentingan kebijakan dengan kebutuhan nyata masyarakat, sekaligus mendorong partisipasi masyarakat dalam situasi yang belum sepenuhnya kondusif. Ketika partisipasi belum terbangun, pekerja sosial sering kali harus memilih antara menjalankan program sesuai prosedur atau menunda capaian demi membangun kesadaran masyarakat secara bertahap.

Dalam praktik lapangan, keterbatasan partisipasi ini terlihat dari rendahnya kehadiran masyarakat dalam kegiatan edukasi, kurangnya inisiatif warga dalam mendukung program, serta masih kuatnya pola

ketergantungan pada aparat desa petugas pendamping. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa proses pemberdayaan belum sepenuhnya berjalan sebagaimana prinsip dasar CO/CD yang menekankan partisipasi, kemandirian dan penguatan kapasitas komunitas. Akibatnya, program cenderung dipresepsikan sebagai agenda eksternal, bukan sebagai kebutuhan Bersama yang harus dijaga keberlanjutannya oleh masyarakat.

Dalam konteks CO/CD, kondisi ini menjadi tantangan etik tersendiri bagi pekerja sosial. Pekerja sosial berada di posisi yang harus menjembatani kepentingan kebijakan dengan kebutuhan nyata masyarakat, sekaligus mendorong partisipasi masyarakat dalam situasi yang belum sepenuhnya kondusif. Ketika partisipasi belum terbangun, pekerja sosial seringkali harus memilih antara menjalankan program sesuai prosedur atau menunda capaian demi membangun masyarakat secara bertahap.

Selain itu, faktor budaya lokal dan pola komunikasi masyarakat turut memengaruhi dinamika CO/CD. Norma sosial yang masih memandang petugas sebagai pihak “paling tahu” membuat masyarakat cenderung pasif dan kurang kritis terhadap program yang dijalankan. Kondisi ini menuntut pekerja sosial untuk menerapkan pendekatan yang lebih sensitif secara budaya, sekaligus reflektif secara etis, agar proses pemberdayaan tidak bersifat simbolik, tetapi benar-benar membangun kapasitas dan kesadaran masyarakat dalam jangka Panjang.

Dengan demikian implementasi program stunting di Desa Marampiau Hilir menunjukkan bahwa pendekatan CO/CD tidak hanya berkaitan dengan relasi antara pekerja sosial dan masyarakat, tetapi juga dengan struktur kebijakan yang belum sepenuhnya memberikan ruang bagi proses partisipatif. Temuan ini menegaskan pentingnya penguatan perspektif CO/CD dalam program stunting agar intervensi tidak berhenti pada capaian target, tetapi mampu mendorong perubahan sosial yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Analisis Kebijakan Sosial dan Tekanan Target Program

Dari sudut pandang analisis kebijakan sosial, tekanan target yang ditetapkan oleh pemerintah pusat menjadi faktor dominan yang memengaruhi praktik implementasi program stunting di tingkat desa. Target tersebut berfungsi sebagai instrumen akuntabilitas, namun dalam praktiknya dapat mendorong pendekatan yang berorientasi pada angka laporan administratif. Akibatnya, pelaksana program di tingkat desa dihadapkan pada dilema antara kepatuhan terhadap kebijakan dan responsivitas terhadap kondisi sosial masyarakat.

Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara desain kebijakan dan kapasitas implementasi di tingkat lokal. Pekerja sosial dan aktor lapangan harus melakukan sebagai bentuk penyesuaian (*street-level discretion*) untuk memastikan program tetap berjalan. Penyesuaian tersebut seringkali berada di wilayah abu-abu etika, karena dilakukan untuk menjaga keberlangsungan program meskipun tidak selalu sejalan dengan prinsip ideal pekerja sosial.

Dalam praktiknya, bentuk penyesuaian ini dapat berupa penyederhanaan proses pendataan, fleksibilitas dalam pelaksanaan kegiatan, hingga kompromi dalam pelaporan capaian program. Meskipun secara administratif penyesuaian tersebut membantu memenuhi tuntutan kebijakan, secara etis pekerja sosial menghadapi risiko terpinggirkannya nilai-nilai profesi seperti kejujuran, transparansi, dan keberpihakan pada kepentingan terbaik masyarakat. Situasi ini memperlihatkan bahwa tekanan kebijakan tidak hanya berdampak pada aspek teknis pelaksanaan tetapi juga integritas praktik pekerja sosial di lapangan.

Selain itu, tekanan target program turut memengaruhi relasi antar aktor pelaksana tingkat desa. Kurangnya koordinasi lintas sektor dan keterbatasan sumber daya manusia memperkuat beban kerja individu pelaksana program. Dalam kondisi tersebut, pekerja sosial sering kali di posisikan sebagai pelaksana sekaligus penyangga kebijakan, yang harus menanggung konsekuensi Ketika capaian program tidak sesuai dengan target yang ditetapkan. Hal ini mempertegas bahwa dilema etik yang muncul tidak hanya bersifat personal semata, melainkan merupakan produk dari struktur kebijakan yang kurang adaptif terhadap konteks lokal.

Dengan demikian, analisis kebijakan sosial dalam studi ini menegaskan pentingnya perumusan kebijakan stunting yang lebih sensitif terhadap kondisi sosial desa, kebijakan perlu memberikan ruang fleksibilitas yang lebih etis bagi pelaksana di tingkat lokal, agar pekerja sosial dapat menjalankan perannya secara profesional tanpa harus terjebak dalam kompromi etik yang berulang. Integrasi nilai dan etika pekerjaan sosial dalam proses perencanaan, implementasi dan evaluasi kebijakan menjadi kunci untuk memastikan bahwa pencapaian target program tidak mengorbankan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

Implikasi Temuan

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Program Stunting di tingkat desa bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga persoalan etik dan struktural. Dilema etik yang dihadapi pekerja sosial muncul sebagai konsekuensi dari interaksi antara nilai profesional, keterbatasan sumber daya, dan tekanan kebijakan. Oleh karena itu, penguatan pendekatan berbasis komunitas, peningkatan koordinasi lintas sektor, serta penyesuaian target kebijakan dengan konteks lokal menjadi penting untuk meminimalkan dilema etik dalam praktik implementasi program stunting.

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Program Stunting di tingkat desa dapat dipahami semata sebagai persoalan teknis pelaksana program, tetapi merupakan

persoalan sosial yang sarat akan dimensi etik dan struktural. Dilema etik yang dihadapi pekerja sosial dan aktor pelaksana program muncul sebagai konsekuensi dari interaksi antara nilai-nilai profesional pekerja sosial, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan institusional di tingkat desa, serta tekanan kebijakan yang menekankan pencapaian target secara kuantitatif.

Dalam konteks ini pekerja sosial berada pada posisi yang kompleks karena harus menjalankan peran profesionalnya di tengah tuntutan kebijakan yang tidak selalu sejalan dengan kondisi sosial masyarakat. Dari sudut pandang nilai dan etika pekerjaan sosial, situasi tersebut memperlihatkan ketegangan antara prinsip penghormatan dalam martabat manusia, penentuan nasib sendiri, dan kewajiban melindungi kelompok rentan khususnya anak dengan tuntutan administratif program.

Pekerja sosial dihadapkan pada dilema Ketika intervensi dirancang untuk kepentingan terbaik anak tidak sepenuhnya dimanfaatkan sebagaimana tujuan program, sementara tekanan pelaporan dan capaian target harus tetap dipenuhi. Kondisi ini menuntut pekerja sosial untuk terus melakukan refleksi etis agar keputusan yang diambil tidak sekedar pragmatis, tetapi tetap berpijak pada nilai-nilai profesi.

Dari perspektif analisis kebijakan sosial, temuan ini mengindikasikan adanya kesenjangan signifikan antara desain kebijakan di tingkat pusat dan kapasitas implementasi di tingkat lokal. Kebijakan stunting yang dirumuskan secara nasional cenderung bersifat seragam dan kurang mempertimbangkan keragaman konteks sosial, budaya dan ekonomi masyarakat desa. Tekanan target program mendorong praktik *street-level discretion* di kalangan pelaksana program, termasuk pekerja sosial, sebagai bentuk adaptasi terhadap keterbatasan lapangan. Meskipun, penyesuaian tersebut dilakukan untuk menjaga keberlangsungan program praktik ini seringkali berada di wilayah abu-abu etika karena berpotensi mengaburkan akuntabilitas substansif dan tujuan jangka Panjang.

Dalam kerangka *community organization* dan *community development (CO/CD)*, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip partisipasi, pemberdayaan dan penguatan kapasitas komunitas belum sepenuhnya terwujud dalam implementasi Program Stunting di Desa Marampiau Hilir. Pendekatan yang masih cenderung *top-down* membatasi ruang partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program. Akibatnya, rasa kepemilikan masyarakat terhadap program menjadi lemah, yang berdampak pada rendahnya keberlanjutan intervensi.

Kondisi ini menempatkan pekerja sosial pada dilema etik Ketika harus memilih antara mempercepat pelaksanaan program demi memenuhi target atau membangun partisipasi masyarakat secara bertahap sesuai prinsip CO/CD. Selain itu, keterbatasan koordinasi lintas sektor dan minimnya dukungan struktural semakin memperkuat kompleksitas dilema etik dalam praktik pekerjaan sosial. Pekerja sosial tidak hanya berperan sebagai pendamping masyarakat, tetapi juga sebagai mediator kebijakan yang harus menafsirkan dan menerjemahkan kebijakan nasional ke dalam konteks lokal. Peran ganda ini meningkatkan risiko terjadinya kelelahan (*burnout*) dan kompromi etik, terutama Ketika keberhasilan program diukur lebih pada capaian administratif dibandingkan perubahan sosial substansif.

Dengan demikian, implikasi temuan penelitian ini mengaskan perlunya reorientasi kebijakan stunting yang lebih sensitif terhadap konteks lokal dan nilai-nilai pekerjaan sosial. Penguatan pendekatan berbasis komunitas, peningkatan koordinasi lintas sektor, serta penyesuaian target kebijakan dengan realitas sosial masyarakat desa menjadi Langkah strategis untuk meminimalkan dilema etik dalam praktik implementasi. Integrasi prinsip etika pekerjaan sosial, termasuk dalam kerangka CO/CD dan analisis kebijakan sosial, penting untuk memastikan program stunting tidak hanya berjalan administratif, tetapi juga berkontribusi pada keadilan sosial, keberlanjutan intervensi, kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dinamika implementasi Program Stunting BKKBN di tingkat desa serta mengidentifikasi tantangan dan dilema etik yang dihadapi oleh pekerja sosial dan aktor pelaksana program. Hasil kajian menunjukkan bahwa implementasi program di Desa Marampiau Hilir menghadapi hambatan struktural dan kultural yang signifikan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap stunting, lemahnya koordinasi lintas sektor, serta tekanan pencapaian target dari pemerintah pusat. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan program stunting tidak hanya ditentukan oleh kebijakan, tetapi sangat bergantung pada konteks sosial dan kapasitas implementasi di tingkat lokal.

Studi ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan keilmuan pekerjaan sosial dengan menyoroti dilema etik yang muncul dalam praktik implementasi kebijakan sosial berbasis keluarga. Pekerja sosial berada pada posisi strategis namun dilematis Ketika harus menyeimbangkan nilai-nilai profesional, seperti penghormatan terhadap martabat manusia dan pemberdayaan masyarakat, dengan tuntutan administratif dan target program. Temuan ini memperluas pemahaman mengenai praktik pekerjaan sosial di level akar rumput (*street-level practice*), khususnya dalam konteks program nasional yang bersifat *top-down*.

Secara aplikatif, hasil penelitian ini menunjukkan pentingnya penguatan pendekatan berbasis komunitas dalam pelaksanaan Program Stunting BKKBN. Peningkatan kapasitas pelaksana program, penguatan edukasi keluarga yang berkelanjutan, serta mekanisme koordinasi lintas sektor yang lebih adaptif terhadap konteks lokal menjadi prasyarat untuk meminimalkan dilema etik dan meningkatkan efektivitas

program. Temuan ini menegaskan bahwa perlunya kebijakan yang lebih fleksibel agar pelaksana lapangan memiliki ruang diskresi yang etis dan profesional.

Lebih lanjut, temuan penelitian ini juga menegaskan bahwa dilema etik dalam implementasi program stunting tidak dapat menegaskan bahwa dilema etik tidak dapat dipisahkan dari struktur kebijakan sosial yang mengatur praktik di tingkat lokal. Ketidakseimbangan antara tuntutan pencapaian target dan kompleksitas kondisi sosial masyarakat berpotensi menempatkan pekerja sosial pada situasi kompromi etik yang berulang. Oleh karena itu, refleksi etik perlu diposisikan sebagai bagian integral dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program stunting, bukan sekedar sebagai pertimbangan individual pekerja sosial.

Sebagai pengembangan kedepan, penelitian lanjutan dapat dilakukan dengan melibatkan perspektif keluarga penerima manfaat secara lebih mendalam untuk memahami proses pengambilan keputusan di tingkat rumah tangga. Selain itu, studi komparatif antar desa atau wilayah dengan karakteristik sosial yang berbeda dapat memberikan gambaran yang lebih luas mengenai variasi dilema etik dalam implementasi program stunting. Penelitian selanjutnya juga dapat mengkaji model intervensi berbasis *community development* yang lebih efektif dalam menjembatani tuntutan kebijakan dan kebutuhan nyata masyarakat.

Dengan demikian, penelitian ini menekankan bahwa keberhasilan program stunting membutuhkan pendekatan yang tidak hanya teknokratis, tetapi juga etis dan kontekstual. Integrasi nilai dan etika pekerjaan sosial dalam kebijakan dan praktik lapangan menjadi kunci untuk memastikan bahwa intervensi yang dilakukan tidak hanya memenuhi indikator keberhasilan program, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan sosial yang berkelanjutan dan berkeadilan bagi masyarakat desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Antasari, D. A. (t.t.). LAPORAN AKHIR KULIAH KERJA NYATA (KKN) TEMATIK MAHASISWA PEDULI STUNTING DESA MARAMPIAU HILIR KECAMATAN CANDI LARAS SELATAN KABUPATEN TAPIN.
- Banks, S. (2012). *Ethics and Values in Social Workers*. Palgrave Macmillan.
- Black, R. E., Victoria, C. G., Walker, S. P., P, de O., & Uauy, R. (2013). Maternal and Child undernutrition and overweight in low-income and middle-income countries. *The Lancet*, 382 no. 8990, 427–452.
- Healy, K. (2014). *Social Work Theory Context: Creating Frameworks for Practice*. Palgrave Macmillan.
- Lipsky, M. (2010). *Street-Level Bureaucracy: Dilemmas of the Individual in Public Services* (Revisi). Russel Sage Foundation.
- PEDOMAN PELAKSANAAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING (Jakarta). (2021). BKKBN.
- Ruel, M. T., Alderman, H., & Maternal and Child Study Group. (2018). Nutrition Sensitive Interventions and Programmes: How can They Help to Accelerate Progress Improving Maternal and Child Nutrition? *The Lancet*, 382, 538–551.
- Social Work Statement of Ethical Principle. (2018). International Federation of Social Workers (IFSW).
- Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Stunting 2018-2024 (Jakarta). (2020). Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Ellya Susilowati. (2020). *Praktik Pekerjaan Sosial Dengan Anak* (Admiral Nelson Aritonang, Tuti Kartika, Nike Vonika, & Muhammad Ananta Firdaus (eds.)). Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung.
- Haecal, M. I. F. (2022). ANALISIS FENOMENA SOSIAL PADA SISWA SD NEGERI 2 DESA SANDING DI DALAM PROSES BELAJAR MENGAJAR. *Pekerjaan Sosial*. <https://jurnal.poltekesos.ac.id/index.php/peksos/article/view/1176>
- Haecal, M. I. F. (2023). The Meaning of al-Hikmah in the Tafsir of Surah Luqman Verse 12: A Comparative Analysis Study of Tafsir Nusantara by Bisri Mustafa and Quraish Shihab. *FOKUS Jurnal Kajian Keislaman Dan Kemasyarakatan*, 8(1), 27. <https://doi.org/10.29240/jf.v8i1.6542>
- Haecal, M. I. F., & Rusmana, D. (2022). Historical Conception According To The Natural Malay Tafsir Of Turjuman Al-Mustafad: A Tafsir Study Of The Nusantara. *Al-Risalah Jurnal Ilmu* https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_risalah/article/view/28360
- Soelton, M., Apriani, F., Wahyono, T., Arief, H., & ... (2021). Conceptualizing the role of

- organizational performance and good corporate governance in Social Welfare Institutions Banten-Indonesia. ... *Journal of Innovative*
https://www.researchgate.net/profile/Ellya-Susilowati/publication/350957821_Conceptualizing_the_Role_of_Organizational_Performance_and_Good_Corporate_Governance_in_Social_Welfare_Institutions_Banten-Indonesia/links/607c43cf8ea909241e0b58a0/Conceptualizing-the-Role-of-Organizational-Performance-and-Good-Corporate-Governance-in-Social-Welfare-Institutions-Banten-Indonesia.pdf
- Subardhini, M., Susilowati, E., & Herlina, E. (2021). Praktik Pekerja Sosial Dalam Pelayanan Sosial Anak Balita Pada Masa Covid-19 Di Satuan Pelayanan Perlindungan Sosial Anak Balita di Kota Bandung. *Praktik Pekerjaan Sosial Dengan Individu Dan*
- Susilawati, E. S., Riasih, T., & ... (2019). The needs of community-based integrated child protection in West Java, Indonesia. *Research for Social*
<https://doi.org/10.1201/9780429428470-43>
- Susilowati, E. (2021). *E-Case Management in Handling Child Victims of Violence in Indonesia*. researchgate.net. https://www.researchgate.net/profile/Ellya-Susilowati/publication/354786237_E-Case_Management_in_Handling_Child_Victims_of_Violence_in_Indonesia/links/614c9c483c6cb310698ae807/E-Case-Management-in-Handling-Child-Victims-of-Violence-in-Indonesia.pdf
- Susilowati, E., Ocktilia, H., & Nainggolan, A. (n.d.). Victims of Terrorism Network in Indonesia. *Researchgate.Net*. https://www.researchgate.net/profile/Aufa-Mahtiza/publication/376609878_REVIEW_ARTICLE_SOCIAL_PROTECTION_OF_CHILD_VICTIMS_OF_TERRORISM_NETWORK_IN_INDONESIA/links/65805b3960b507187cb80199/REVIEW-ARTICLE-SOCIAL-PROTECTION-OF-CHILD-VICTIMS-OF-TERRORISM-NETWORK-IN-INDONESIA.pdf
- Susilowati, E., Ocktilia, H., & Nainggolan, A. (2023). Social Protection Of Child Victims Of Terrorism Network In Indonesia. ... *de La Facultad de Geografía e*
<https://vegueta.org/pdf/2023/Ellya Susilowati.pdf>